

# **WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*) DI INDONESIA**

**RAHMAT TRI FIAN TO**

## **ABSTRAK**

Transaksi jual beli melalui media internet ini dengan sangat cepat menjadi sarana telekomunikasi bisnis yang sangat populer yang secara otomatis menimbulkan berbagai macam persoalan hukum yang tidak sederhana yang dibayangkan. Persoalan-persoalan tersebut dapat berupa praktik pelaksanaan kontrak, wanprestasi, sampai dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang diangkat adalah mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) di Indonesia dan Untuk mengkaji bentuk upaya hukum dalam sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yang lebih ditekankan pada bahan hukum primer dan sekunder. Data-data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang bersandar pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Penulis menyarankan adanya saling melengkapi antar peraturan perundang-undangan, antara KUH Perdata, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, dalam mengatur mengenai perlindungan terhadap pihak-pihak dalam transaksi melalui media internet (*e-commerce*).

**Kata kunci : Transaksi Elektonik, Sengketa, Wanprestasi,  
Perlindungan Konsumen**

# **DEFAULT IN THE BUYING AND SELLING THROUGH INTERNET MEDIA IN INDONESIA**

**RAHMAT TRI FIAN TO**

## **ABSTRACT**

Buying and selling via the Internet is rapidly becoming a business telecommunications facilities that are very popular that automatically cause a variety of legal issues that are not as simple as one might imagine. These problems may be the practice of execution of the contract, breach of contract, tort to incur losses for all parties. Based on the description of the issues raised was the form of legal protection and remedies in resolving disputes in default in sale and purchase transactions via the Internet (e-commerce) in Indonesia. This study was conducted to determine the form of legal protection for consumers against defaulting dispute in buying or selling via the Internet (e-commerce) in Indonesia and to assess the form of legal remedy in the dispute defaults on trading transactions via the Internet (e-commerce) in Indonesia. The method used is the normative juridical approach that is more focused on primary and secondary legal materials. The data collected by the data collection methods that rely on secondary date, ie date obtained through the study or library research based on the applicable laws and regulations associated with theories relevant law and practice concerning the implementation of positive law and further issues analyzed using qualitative normative date. The results showed that the consumer protection against default actions businesses in e-commerce transactions, in particular in terms of regulation on consumer protection against default actions businesses in e-commerce still needs to be addressed again. Basically, there is no provision regulating specifically on consumer protection against defaults acts businesses in e-commerce transactions. The authors suggest the existence of complementarity between legislations, the Civil Code, the Consumer Protection Law and its implementing regulations, laws on Information and Electronic Transactions and its implementing regulations, in governing the protection of parties to transactions via the Internet (e-commerce).

**Keyword : Electronic Transactions, Disputes, Default, Consumer Protection**